



**RANCANGAN AKHIR
RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin dan karunianya jualah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Tahun 2021 disusun sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada penyusunannya.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh segenap jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga memberikan manfaat bagi peningkatan investasi yang pada akhirnya sebagai pengantar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan

Banjarbaru,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan,

Ir. H. Nafarin, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19620513 198903 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2020.....	 6
Tabel Pengukuran Kinerja SKPD	14
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 35
3.1 Tujuan dan Sasaran SKPD	36
Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja	36
3.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	36
3.2.1 Susunan Kepegawaian	37
3.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi	37
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 70
 BAB V PENUTUP	 72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 072 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui : perbaikan koordinasi antara Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif dibidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha.

Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan investor dalam hal pengurusan perizinan dan nonperizinan, berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2014 disebutkan bahwa seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Kalfikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.
- j. Peraturan Gubernur Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kalimantan Selatan.
- k. Peraturan Gubernur Nomor 080 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal untuk tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan tersusun menjadi 5 bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA Perangkat Daerah Tahun 2019

Menjabarkan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun lalu / terakhir.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tujuan dan sasaran SKPD serta tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan rencana kerja SKPD, tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan dan pelaksanaan urusan penanaman modal, serta uraian program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, Sasaran utama penanaman modal yang ingin dicapai pada tahun 2019 yakni peningkatan investasi. Target realisasi investasi PMA dan PMDN adalah sebesar Rp.10,5 Trilyun. Selain itu juga ditargetkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan Target B (82,50) Adapun rincian pencapaian target SKPD disajikan dalam tabel berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	2019		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)	10.500.000.000.000	15.654.500.000.000	149,09%
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (82,50)	B (86,79)	105,20%

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun anggaran 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan seperti yang telah direncanakan. Namun, untuk mengetahui sampai sejauh mana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi kinerja. Pada tahun anggaran 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan 6 (enam) Program yang terdiri dari 31 Kegiatan dengan rincian 4 Program Non-Urusan yang terdiri dari 21 Kegiatan serta 2 Program Prioritas Pembangunan Daerah (Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Publik di Bidang Perizinan dan Nonperizinan) yang terdiri dari 10 Kegiatan. Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

I. Program Kegiatan Non-Urusan (rutin perkantoran dan kesekretariatan)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi kinerja (fisik) sebesar 100,00%, dengan Kegiatan:
 - 1.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - 1.2. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - 1.3. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - 1.4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - 1.5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - 1.6. Penyediaan makanan dan minuman dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - 1.7. Penataan perpustakaan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - 1.8. Penyediaan jasa teknis perizinan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - 1.9. Penyediaan Jasa kebersihan dan keamanan kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - 1.10. Penyediaan alat tulis kantor, cetakan dan penggandaan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - 1.11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi kinerja (fisik) sebesar 100,00%, dengan kegiatan:
 - 2.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - 2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%

- 2.3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- 2.4. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- 2.5. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%, dengan kegiatan:
 - 3.1. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00% dengan hasil 2 dokumen IKM
 - 3.2. Penyusunan dan pelaporan kinerja SKPD realisasi kinerja (fisik) 100,00% dengan hasil 5 dokumen perencanaan dan pelaporan.
 - 3.3. Penyusunan dan pelaporan keuangan dan aset SKPD realisasi kinerja (fisik) 100,00% dengan hasil 1 dokumen laporan keuangan akhir tahun.

II. Program Kegiatan Urusan Penanaman Modal

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Alokasi anggaran untuk Program ini senilai Rp. 2.971.800.000,-. Realisasi Keuangan untuk Program dan Kegiatan-kegiatan di dalamnya adalah sebesar Rp2.819.511.600,- atau setara dengan 94,76%, sementara realisasi fisiknya adalah fisik sebesar 94,88%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini adalah sebagai berikut.

1.1. Penyelenggaraan Pameran Investasi

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp1.048.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp1.017.808.600,00 (97,12%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1.1.1. Tersedianya 1 orang Pengelola Pameran dan Kemitraan yang difasilitasi jaminan sosial kesehatan (BPJS) non PNS selama 1 tahun.

1.1.2. Kegiatan koordinasi ke BKPM RI

- 1.1.3. Media promosi berupa Baliho Promosi Investasi di 2 lokasi, yaitu Jakarta dan Bandara Syamsudin Noor.
- 1.1.4. Partisipasi pada pameran investasi di dalam negeri sebagai berikut
 - 1.1.4.1. Pameran Investasi Gelar UMKM/IKM dan Investasi Daerah 2019 di Bali (27 Maret – 01 April 2019).
 - 1.1.4.2. BITTRA Bandung Expo 2019 di Bandung (03 – 07 April 2019).
 - 1.1.4.3. PPIP Surabaya Expo 2019 di Surabaya (27 – 30 Juni 2019).
 - 1.1.4.4. Pameran Produk Khas/Unggulan dan Peluang Investasi Daerah di Batam (14 – 18 Maret 2019)
 - 1.1.4.5. Kalsel Expo di Banjarbaru pada tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan 03 September 2019
- 1.2. Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp350.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp320.095.650,00 (91,46%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

 - 1.2.1. Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Borneo Bu Mun (Ibu Sulistiyoningsih) dengan Usaha Ojek Online Amang Ojek (Bapak M. Nicko Farizki).
 - 1.2.2. Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM VCO Rumah Banjar (Ibu Dra Asmah) dengan Usaha Ojek Online Amang Ojek (Bapak M. Nicko Farizki).
 - 1.2.3. Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Borneo Bu Mun (Ibu Sulistiyoningsih) dengan Bu Kus Katering Nusa Tenggara barat (Ibu Wagini).
 - 1.2.4. Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM VCO Rumah Banjar (Ibu Dra Asmah) dengan UD Cahaya Langit (Bapak Sofyan Sandi).

- 1.2.5. Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM VCO Rumah Banjar (Ibu Dra Asmah) dengan Al Min Nusa Tenggara Barat (Bapak Zulhadi).
- 1.2.6. Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Prov. Kalsel dengan Usaha Ojek Online Amang Ojek (Bapak M Nicko Farizki)
- 1.2.7. Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Prov. Kalsel dengan LPB PPKP (Layanan Pengembangan Bisnis Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan pengusaha Kecil) Mataram.
- 1.2.8. Rekapitulasi data UMKM Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
- 1.2.9. Kegiatan Matcmaking/Kemitraan Dunia Usaha untuk Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dihadiri oleh UMKM dan DPMPTSP Kab/Kota se-Kalsel di Hotel HBI, tanggal 17 – 18 Oktober 2019.
- 1.3. Identifikasi Potensi dan Evaluasi Kebijakan Investasi

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp350.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp331.539.150,00 (94,73%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

 - 1.3.1 Rapat Koordinasi Deregulasi Penanaman Modal di Aula DPMPTSP Prov. Kalsel, Tanggal 02 Mei 2019.
 - 1.3.2 Sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) di Aula DPMPTSP Prov. Kalsel, Tanggal 03 Juli 2019.
 - 1.3.3 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 021 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.
 - 1.3.4 Laporan Identifikasi Potensi Kerbau Rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.4. Forum Kawasan Industri Kalimantan Selatan

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp410.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp404.177.350,00 (98,58%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Output dari kegiatan ini adalah Forum Investasi Kalimantan Selatan Tahun 2019 di Hotel Aston – Batam, Tanggal 11 Juli 2019.

Peserta yang menghadiri forum tersebut sebanyak 100 orang terdiri Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Walikota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, kantor Dagang Industri Kota Batam, perwakilan dari Investor Malaysia, Singapura dan Investor Kota Batam, Pejabat SKPD teknis terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Perwakilan DPMPTSP kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Perwakilan DPMPTSP Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, dan Pengusaha Kota Batam.

1.5. Pengendalian Pelaksanaan Investasi Dalam Rangka Fasilitasi Penyelesaian Masalah.

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp363.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp344.678.600,00 (94,95%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1.5.1. Rapat Percepatan Realisasi Penanaman Modal bertempat di Aula DPMPTSP Prov. Kalsel, Tanggal 11 Oktober 2019.

1.5.2. Pengawasan, monitoring dan pembinaan proyek PMA/PMDN Kabupaten/Kota se Kalsel, dengan rincian sebagai berikut.

1.5.2.1. Kota Banjarmasin sebanyak 5 kali.

1.5.2.2. Kota Banjarbaru 3 kali.

1.5.2.3. Kabupaten Banjar 4 kali.

1.5.2.4. Kabupaten Barito Kuala 4 kali.

1.5.2.5. Kabupaten Tapin 4 kali.

1.5.2.6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 4 kali.

1.5.2.7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 3 kali.

- 1.5.2.8. Kabupaten Hulu Sungai Utara 3 kali.
- 1.5.2.9. Kabupaten Balangan 4 kali.
- 1.5.2.10. Kabupaten Tabalong 4 kali
- 1.5.2.11. Kabupaten Tanah Laut 5 kali
- 1.5.2.12. Kabupaten Tanah Bumbu 5 kali.
- 1.5.2.13. Kabupaten Kotabaru 5 kali.

1.6. Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp450.800.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp401.212.250,00 (89,00%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah sebagai berikut

- 1.6.1. Buku Rekapitulasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018.
- 1.6.2. Buku Perkembangan Investasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018.
- 1.6.3. Rapat Rekonsiliasi Data Penanaman Modal Kalimantan Selatan Tahun 2019 di Aula DPMPTSP Prov. Kalsel, Tanggal 24 Juli 2019.
- 1.6.4. Pengembangan Aplikasi SiMAPAN (Belanja jasa tenaga ahli oleh PT. Afsar Primula Solusindo).
- 1.6.5. Software Sistem Keamanan Informasi (belanja modal software Sistem Keamanan Informasi oleh CV. Deyan Putra Utama).
- 1.6.6. Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online Se-Kalsel Tahun 2019 di Aula DPMPTSP Prov. Kalsel, Tanggal 10 Oktober 2019.
- 1.6.7. Data dan Informasi Penanaman Modal Kab/Kota Se-Kalsel yang mutakhir (Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam rangka Pemutakhiran Data dan Informasi Kab/Kota se Kalsel).
- 1.6.8. Aplikasi SIMAPAN Platform android di Play Store.
- 1.6.9. Sistem Keamanan Informasi di Aplikasi SiMAPAN.

III. Program Pelayanan Publik di Bidang Perizinan dan Nonperizinan.

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.113.842.750,- dan terealisasi sebesar Rp1.066.658.350,- (95,76%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1.1. Kegiatan Rapat Koordinasi Perizinan Perekonomian dan Sosial dengan Instansi terkait dan Kab/Kota se Kalsel

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp360.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp351.330.050,00 (97,59%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1.1.1. Rapat Koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka penerbitan perizinan/nonperizinan Bidang Produksi dan Industri serta perizinan/nonperizinan Bidang Sarana Perekonomian dan Sosial.

1.1.2. Sosialisasi Perizinan Bidang Produksi dan Industri (sektor Ketenagalistrikan) bertempat di Aula DPMPTSP, Tanggal 30 Juli 2019.

1.1.3. Sosialisasi Perizinan Bidang Produksi dan Industri (Sektor Perikanan) di Halaman Kantor Pelabuhan Perikanan Batulicin, Tanggal 23 April 2019.

1.1.4. Kegiatan Rapat Koordinasi dengan PT.KEL.

1.1.5. Rapat Koordinasi PT Yurda Ardisenggara tentang Izin Nasional

1.1.6. Rapat Koordinasi PT Makmur Sejahtera Wisaya Tentang Kewenangan Izin SIPA.

1.1.7. Perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka koordinasi, konsultasi, atau konsolidasi perizinan.

1.2. Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Perizinan dan Evaluasi Perizinan.

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp268.842.750,00. Serapan keuangan sebesar Rp262.054.500,00 (97,48%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya peninjauan lapangan dalam rangka penerbitan perizinan/nonperizinan Bidang Produksi dan Industri serta Bidang Sarana Perekonomian dan Sosial.

1.3. Evaluasi dan Sertifikasi Standar Pelayanan SMM Berbasis ISO 9001
Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp150.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp146.456.200,00 (97,64%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1.3.1. Refreshing Course Re-Awareness ISO 9001:2015 di DPMPTSP Prov. Kalsel, Tanggal 04 Februari 2019.

1.3.2. Kegiatan Benchmark ISO 9001:2015 di Graha PT. Sucopindo (Persero) Pusat, Jakarta, Tanggal 8 Februari 2019.

1.3.3. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 Quality Management Systems-Requirements untuk 7 pelayanan publik di Bidang Perizinan Produksi dan Industri pada DPMPTSP Prov. Kalsel.

1.4. Pelayanan Penanaman Modal

Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp335.000.000,00. Serapan keuangan sebesar Rp306.817.600,00 (91,59%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1.4.1. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Perizinan Terintegrasi secara Elektronik melalui OSS, yang diikuti oleh Pegawai dari PTSP Kabupaten/Kota Se-Kalsel di Aula DPMPTSP Prov. Kalsel, Tanggal 14 November 2019.

1.4.2. Kegiatan Workshop Aplikasi dan Regulasi Terbaru tentang Kebijakan Penanaman Modal Tahun 2019, yang diikuti oleh

Pegawai dari PTSP Kabupaten/Kota Se-Kalsel, di Aula
DPMPTSP Prov. Kalsel, Tanggal 26 September 2019

- 1.4.3. Partisipasi pada Kegiatan Forum Diskusi Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS) Tahun 2019
di Hotel Novotel Jakarta, Tanggal 30 April 2019.

Pengukuran Kinerja SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis atau Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Keuangan			Capaian Kinerja		
			Target (Pagu) (Rp)	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase pemenuhan pengurusan administrasi	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
	1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	583,000,000.00	537,846,477.00	92.25	12 Bulan	12 Bulan	100.0
	1.2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	198,000,000.00	187,111,400.00	94.50	12 Bulan	12 Bulan	100.0
	1.3. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	43,000,000.00	42,962,900.00	99.91	12 Bulan	12 Bulan	100.0
	1.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	70,000,000.00	69,836,000.00	99.77	12 Bulan	12 Bulan	100.0
	1.5. Penyediaan Bahan Logistik	Persentase penyediaan dokumen terkait	350,000,000.00	283,525,500.00	81.01	12 Bulan	12 Bulan	100.0

	Kantor	sarana dan prasarana						
	1.6. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	380,000,000.00	356,618,000.00	93.85	12 Bulan	12 Bulan	100.0
	1.7. Penataan Perpustakaan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	70,000,000.00	69,920,300.00	99.89	12 Bulan	12 Bulan	100.0
	1.8. Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	tersedianya jasa teknis perizinan	260,000,000.00	259,812,500.00	99.93	12 Bulan	12 Bulan	100.0 0

Pengukuran Kinerja SKPD (Lanjutan)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis atau Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Keuangan			Capaian Kinerja		
			Target (Pagu) (Rp)	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase pemenuhan pengurusan administrasi	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (lanjutan)							
	1.9. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	240,000,000.00	237,336,500.00	98.89	12 Bulan	12 Bulan	100.0
	1.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	225,000,000.00	219,865,600.00	97.72	12 Bulan	12 Bulan	100.0
	1.11. Rapat-rapat	Persentase pegawai	1,110,000,000.0	1,105,136,500.0	99.56	12 Bulan	12 Bulan	100.0

	Koordinasi dan Konsultasi	administrasi kepegawaian dilayani secara tertib	0	0				0
	Rata-rata capaian kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3,529,000,000.00	3,369,971,677.00	95,49			100.00
▪ Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD ▪ Persentase Aset yang tercatat	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
	2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah aset yang diadakan	545,000,000.00	539,450,000.00	98.98	2 Buah	2 Buah	100.0
	2.2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	550,000,000.00	548,810,698.00	99.78	12 Bulan	12 Bulan	100.0
	2.3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	300,000,000.00	239,863,600.00	79.95	12 Bulan	12 Bulan	100.00

Pengukuran Kinerja SKPD (Lanjutan)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis atau Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Keuangan			Capaian Kinerja		
			Target (Pagu) (Rp)	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
▪ Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD ▪ Persentase Aset yang tercatat	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (lanjutan)							
	2.4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah aset yang diadakan	270,000,000.00	254,465,450.00	94.25	18 Unit	18 Unit	100.00
	2.5. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah aset yang diadakan	113,000,000.00	111,845,090.00	98.98	12 Bulan	12 Bulan	100.00
	Rata-rata capaian kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1,778,000,000.00	1,694,434,748.00	95.30			100.00
▪ Tertibnya sistem perencanaan, pelaporan, capaian kinerja dan keuangan ▪ Persentase kenaikan nilai	3. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan							
	3.1. Penyusunan dan Pelaporan Keuangan dan Aset SKPD	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	15,600,000.00	9,700,000.00	62.18	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
	3.2. Penyusunan	Jumlah dokumen	261,000,000.00	255,457,900.00	97.88	5	5 Dokumen	100.00

komponen pelaporan pada LKIP ▪ Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP	dan Pelaporan Kinerja SKPD	kinerja sesuai ketentuan				Dokumen		0
	3.3. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey dan tersusunnya dokumen IKM	46,000,000.00	45,960,000.00	99.91	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00
	Rata-rata capaian kinerja Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan		322,600,000.00	311,117,900.00	96.41			100.00

Pengukuran Kinerja SKPD (Lanjutan)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis atau Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Keuangan			Capaian Kinerja		
			Target (Pagu) (Rp)	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
▪ Persentase Pelatihan Bimtek yang paham	4. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur							
	4.1. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pelatihan Bimtek yang Paham	160,000,000.00	158,949,500.00	99.34	8 Orang	8 Orang	100.00
	4.2. Pengadaan Pakaian Kerja dan Hari-hari Tertentu	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	85,000,000.00	84,322,300.00	99.20	256 Stell	256 Stell	100.00
	Rata-rata capaian kinerja Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur		245,000,000.00	243,271,800.00	99.29			100.00
▪ Realisasi Investasi PMA dan PMDN	5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi							
	5.1. Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha	Jumlah kemitraan dunia usaha	350,000,000.00	320,095,650.00	91.46	2 Kemitraan	2 Kemitraan	100.00
	5.2. Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pelaksanaan pameran investasi	1,048,000,000.00	1,017,808,600.00	97.12	5 Kali	5 Kali	100.00
	5.3. Identifikasi Potensi dan	Dokumen Evaluasi Kebijakan	350,000,000.00	331,539,150.00	94.73	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00

	Evaluasi Kebijakan Investasi					(Berita acara)	(Berita acara)	
		Identifikasi Potensi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
	5.4. Forum Investasi Kawasan Industri Kalimantan Selatan	Persentase rekomendasi hasil forum yang ditindaklanjuti	410,000,000.00	404,177,350.00	98.58	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00

Pengukuran Kinerja SKPD (Lanjutan)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis atau Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Keuangan			Capaian Kinerja		
			Target (Pagu) (Rp)	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realisasi Investasi PMA dan PMDN	5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (Lanjutan)							
	5.5. Pengendalian Pelaksanaan Investasi Dalam rangka Fasilitas Penyelesaian Masalah	Persentase Pengawasan Perusahaan PM	363,000,000.00	344,678,600.00	94.95	40%	40%	100.00
	5.6. Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Pengelolaan system informasi perizinan dan penanaman modal	450,800,000.00	437,912,250.00	97.14	12 Bulan	12 Bulan	100.00
	Rata-rata capaian kinerja Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		2,971,800,000.00	2,856,211,600.00	96.11			100.00
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	6. Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan							
	6.1. Rapat Koordinasi Perizinan Dengan Instansi Terkait dan Sosialisasi	Pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi	360,000,000.00	351,330,050.00	97.59	4 Kali	4 Kali	100.00

	Perizinan							
	6.2. Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Perizinan dan Evaluasi Perizinan	Persentase pemenuhan permohonan perizinan dan non perizinan	268,842,750.00	262,054,500.00	97.48	12 Bulan	12 Bulan	100.00

Pengukuran Kinerja SKPD (Lanjutan)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis atau Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Keuangan			Capaian Kinerja		
			Target (Pagu) (Rp)	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
▪ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	6. Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan (lanjutan)							
	6.3. Evaluasi dan Sertifikasi Standar Pelayanan SMM Berbaris ISO 9001	ISO 9001	150,000,000.00	146,456,200.00	97.64	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00
	6.4. Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Workshop/ Sosialisasi	335,000,000.00	306,817,600.00	91.59	3 Kali	3 kali	100.00
	Rata-rata capaian kinerja Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan		1,113,812,750.00	1,066,658,350.00	95.76			100.00
RATA- RATA CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN			9,960,242,750.00	9,541,666,075.00	95.80			100.00

LAPORAN KONSOLIDASI BULANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2019

DAERAH KALIMANTAN SELATAN
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

No	PROGRAM /NO.DPA/ KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	SERAPAN		SATUAN UNIT	SISA PAGU
				KEU (%)	FISIK (%)		
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.529.000.000,00	3.369.971.677,00	95,49	100.00		159.028.323,00
1	• Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	583.000.000,00	537.846.477,00	92,25	100.00	12 bulan	45.153.523,00
2	• Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	198.000.000,00	187.111.400,00	94,50	100.00	12 bulan	10.888.600,00
3	• Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.000.000,00	42.962.900,00	99,91	100.00	12 bulan	37.100,00
4	• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.000.000,00	69.836.000,00	99,77	100.00	12 bulan	164.000,00
5	• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350.000.000,00	283.525.500,00	81,01	100.00	12 bulan	66.474.500,00
6	• Penyediaan Makanan dan Minuman	380.000.000,00	356.618.000,00	93,85	100.00	11 bulan	23.382.000,00

7	• Penataan Perpustakaan	70.000.000,00	69.920.300,00	99,89	100.00	12 bulan	79.700,00
8	• Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	260.000.000,00	259.812.500,00	99,93	100.00	12 bulan	187.500,00
9	• Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	240.000.000,00	237.336.500,00	98,89	100.00	12 bulan	2.663.500,00
No	PROGRAM /NO.DPA/ KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	SERAPAN		SATUAN UNIT	SISA PAGU
				KEU (%)	FISIK (%)		
10	• Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan	225.000.000,00	219.865.600,00	97,72	100.00	12 bulan	5.134.400,00
11	• Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.110.000.000,00	1.105.136.500,00	99,56	100.00	12 bulan	4.863.500,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.778.000.000,00	1.694.434.748,00	95,30	100.00		83.565.252,00
12	• Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	545.000.000,00	539.450.000,00	98,98	100.00	2 Unit	5.550.000,00
13	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	550.000.000,00	548.810.698,00	99,78	100.00	12 bulan	1.189.302,00
14	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	300.000.000,00	239.863.600,00	79,95	100.00	12 bulan	60.136.400,00

15	• Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	270.000.000,00	254.465.450,00	94,25	100.00	18 Unit	15.534.550,00
16	• Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.000.000,00	111.845.000,00	98,98	100.00	12 bulan	1.155.000,00
III	Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	322.600.000,00	311.117.900,00	96,44	100.00		11.482.100,00
17	• Penyusunan dan Pelaporan Keuangan dan Aset SKPD	15.600.000,00	9.700.000,00	62,18	100.00	1 dokumen	5.900.000,00
18	• Penyusunan dan pelaporan Kinerja SKPD	261.000.000,00	255.457.900,00	97,88	100.00	5 dokumen	5.542.100,00
19	• Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat	46.000.000,00	45.960.000,00	99,91	100.00	2 dokumen	40.000,00

No	PROGRAM /NO.DPA/ KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	SERAPAN		SATUAN UNIT	SISA PAGU
				KEU (%)	FISIK (%)		
IV	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur	245.000.000,00	243.271.800,00	99,29	100.00		1.728.200,00
20	• Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur	160.000.000,00	158.949.500,00	99,34	100.00	19 Orang	1.050.500,00
21	• Pengadaan pakaian Kerja dan Hari-hari Tertentu	85.000.000,00	84.322.300,00	99,20	100.00	256 Stell	677.700,00
V	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	2.971.800.000,00	2.856.211.600,00	96,11	100.00		115.588.400,00
22	• Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha	350.000.000,00	320.095.650,00	91,46	100.00	5 kemitraan	29.904.350,00
23	• Penyelenggaraan Pameran Investasi	1.048.000.000,00	1.017.808.600,00	97,12	100.00	5 Kali	30.191.400,00
24	• Forum Investasi Kalimantan Selatan	410.000.000,00	404.177.350,00	98,58	100.00	1 Kegiatan	5.822.650,00
25	• Identifikasi Potensi dan Evaluasi Kebijakan Investasi	350.000.000,00	331.539.150,00	94,73	100.00	1 Dokumen 1 Dokumen (Berita Acara)	18.460.850,00

26	• Pengendalian Pelaksanaan Investasi Dalam Rangka Fasilitasi Penyelesaian Masalah	363.000.000,00	344.678.600,00	94,95	100.00	58%	18.321.400,00
27	• Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	450.800.000,00	437.912.250,00	97,14	100.00	12 Bulan	12.887.750,00

No	PROGRAM /NO.DPA/ KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	SERAPAN		SATUAN UNIT	SISA PAGU
				KEU (%)	FISIK (%)		
7	Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	1.113.842.750,00	1.066.658.350,00	95,76	100.00		47.184.400,00
28	• Pelayanan Penanaman Modal	335.000.000,00	306.817.600,00	91,59	100.00	3 Kali	28.182.400,00
29	• Evaluasi dan Sertifikasi Standar Pelayanan SMM Berbaris ISO 9001	150.000.000,00	146.456.200,00	97,64	100.00	1 dokumen	3.543.800,00
30	• Peninjauan Lapangan Untuk Syarat Teknis Pemberian Perizinan dan Evaluasi Perizinan	268.842.750,00	262.054.500,00	97,48	100.00	12 Bulan	6.788.250,00
31	• Rapat Koordinasi Dengan Instansi Terkait dan Sosialisasi Perizinan	360.000.000,00	351.330.050,00	97,59	100.00	4 Kali	8.669.950,00
	Total:	9.960.242.750,00	9.541.666.075,00	95,80	100.00		418.576.675,00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

**“Kasel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera,
Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing ”**

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil;
2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik;
3. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal;
4. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya; dan
5. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

3.1. Tujuan dan Sasaran SKPD

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka perlu dipertimbangkan adanya visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Misi 5 RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2020, hubungannya dapat dijabarkan sebagai berikut.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki indikator kinerja yang berujung pada realisasi investasi di daerah setiap tahunnya. Adapun keterkaitan antara kinerja utama dan indikator kinerja disajikan pada tabel berikut:

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2021
1.	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. 14,4 Trilyun
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	“B” 85

3.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Adapun fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
4. Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
5. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam;
6. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial;
7. Pelaksanaan layanan pengaduan, kebijakan dan informasi;
8. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

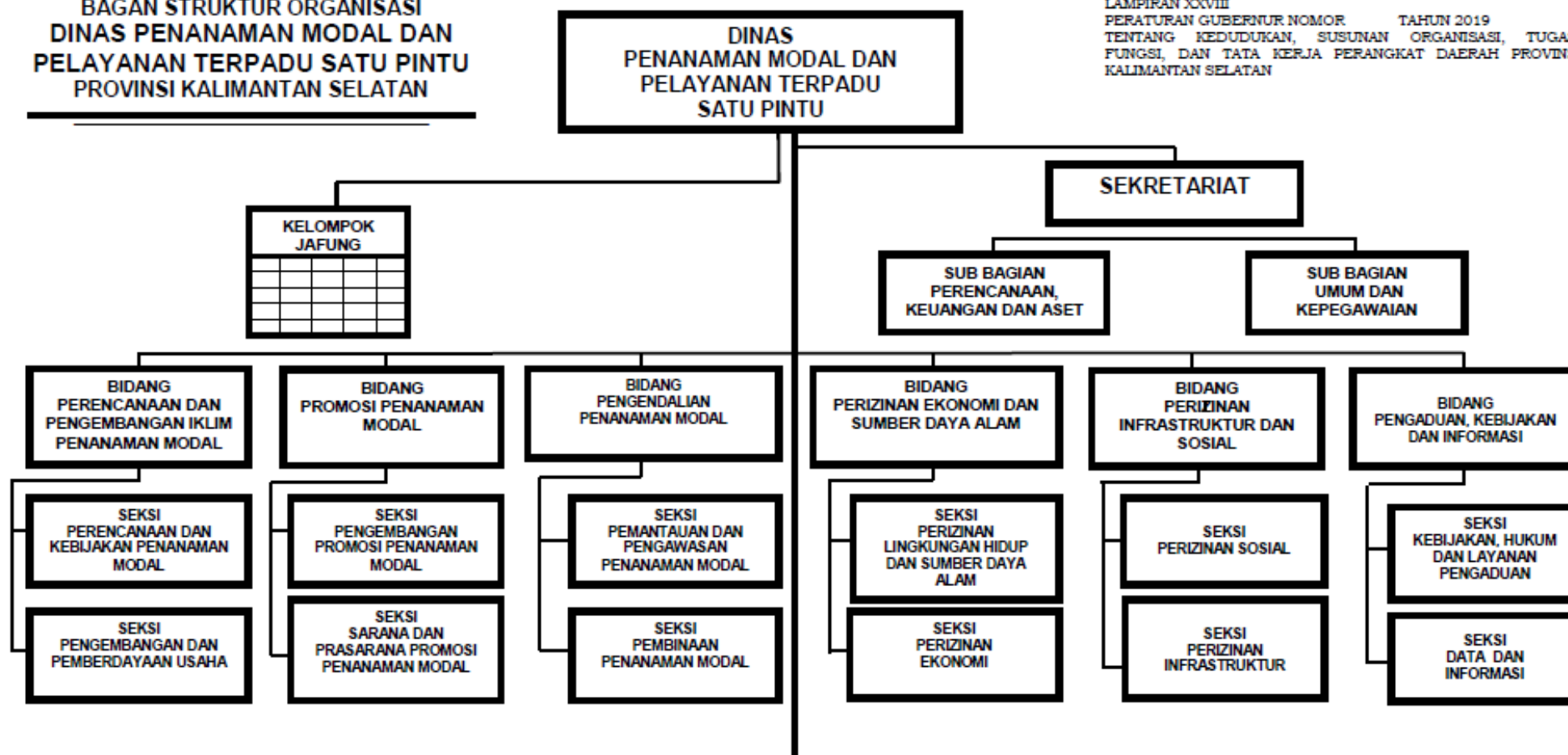
3.2.1. Susunan Kepegawaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah membentuk susunan kepegawaian sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat**, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. **Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**, terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha.
4. **Bidang Promosi Penanaman Modal**, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal.
5. **Bidang Pengendalian Penanaman Modal**, terdiri atas:
 - a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Pembinaan Penanaman Modal.
6. **Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**, terdiri atas:
 - a. Seksi Perizinan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; dan
 - b. Seksi Perizinan Ekonomi.
7. **Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial**, terdiri atas:
 - a. Seksi Perizinan Infrastruktur; dan
 - b. Seksi Perizinan Sosial.
8. **Bidang Kebijakan, Hukum dan Informasi**, terdiri atas:
 - a. Seksi Kebijakan, Hukum dan Pengaduan Layanan; dan
 - b. Seksi Data dan Informasi.
9. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN



3.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas mengoordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
- d. koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- e. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial;
- g. pelaksanaan layanan pengaduan, kebijakan, dan informasi;
- h. pengelolaan kesekretariatan.

Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam;

- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial;
- g. mengoordinasikan layanan pengaduan, kebijakan dan informasi;
- h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas PMPTSP;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas PMPTSP;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas PMPTSP;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas PMPTSP;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas PMPTSP;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas PMPTSP;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bagian

a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan, rencana anggaran, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut.

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas PMPTSP;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas PMPTSP;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategik;
- d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas PMPTSP;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas PMPTSP;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas PMPTSP;
- m. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
- n. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
- q. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- t. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah

tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan dan pengembangan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan modal daerah;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian deregulasi penanaman modal daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan iklim usaha di daerah;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan usaha di daerah; dan
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemberdayaan usaha di daerah.

Uraian tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal daerah;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan modal daerah;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan deregulasi penanaman modal daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan iklim usaha di daerah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan usaha di daerah;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan usaha di daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal

Seksi Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan penerapan kebijakan penanaman modal daerah.

Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana dan penerapan kebijakan penanaman modal daerah;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data potensi sektor usaha dan kebijakan penanaman modal daerah;
- c. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi sektor usaha penanaman modal daerah;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanaman modal daerah;
- e. menyiapkan bahan dan membuat peta sebaran potensi sektor usaha penanaman modal daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana penanaman modal daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan daftar skala prioritas sektor usaha penanaman modal daerah;
- h. menyiapkan bahan dan menganalisis pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan dan kebijakan penanaman modal daerah;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan rencana penanaman modal daerah;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan penyusunan rencana dan penerapan kebijakan penanaman modal daerah;
- l. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan kinerja kegiatan penyusunan rencana dan penerapan kebijakan penanaman modal daerah; dan

- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi serta supervisi pengembangan dan pemberdayaan usaha.

Uraian tugas Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pemberdayaan usaha;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi di daerah;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan Pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi.;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta identifikasi sektor usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi di daerah;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi serta supervisi pengembangan dan Pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi di daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan dan Pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi di daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan dan pemberdayaan jaringan permodalan dan pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi peningkatan peran dan pemberdayaan badan usaha dalam penanaman modal;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peningkatan daya saing penanaman modal daerah;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan dan

- pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, menengah, besar dan koperasi;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan Evaluasi kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sektor usaha; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan dan pengembangan sarana promosi penanaman modal daerah;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan dan pengembangan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan program promosi pananaman modal daerah;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah; dan
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan promosi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Bidang Promosi Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis promosi penanaman modal;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan dan pengembangan sarana promosi penanaman modal daerah;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan dan pengembangan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program promosi penanaman modal daerah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan promosi penanaman modal daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, pengumpulan data dan pengembangan promosi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan promosi penanaman modal;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kegiatan promosi penanaman modal daerah;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan promosi penanaman modal daerah;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program promosi penanaman modal daerah;
- f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan promosi penanaman modal daerah;

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan luasan dan jaringan kemitraan penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan promosi penanaman modal daerah;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan luasan, jangkauan dan sasaran promosi penanaman modal daerah;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria promosi penanaman modal;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan promosi penanaman modal daerah;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan promosi penanaman modal daerah;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan dan pengembangan promosi penanaman modal daerah; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal

Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan dan desain sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal adalah sebagai berikut.

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana penanaman modal daerah;

- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis rancang bangun dan desain sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan rancang bangun dan desain sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiapan rancang bangun dan desain sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiapan media promosi penanaman modal daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan jaringan kemitraan penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan publikasi dan distribusi sarana promosi penanaman modal daerah;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam kajian kegiatan penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal

Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan

pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kegiatan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan kegiatan penanaman modal daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan kegiatan penanaman modal daerah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

Uraian tugas Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal daerah;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan kegiatan penanaman modal daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan kegiatan penanaman modal daerah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal

Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan penanaman modal daerah.

Uraian tugas Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kajian teknis dan desain serta pengembangan informasi pemantauan dan pengawasan kegiatan penanaman modal daerah;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kegiatan sektor usaha penanaman modal daerah;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengawasan kegiatan penanaman modal daerah;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sektor usaha penanaman modal daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan tingkat kepatuhan sektor usaha penanaman modal daerah;
- g. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan menyusun laporan pengawasan kepatuhan sektor usaha penanaman modal daerah;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi pemenuhan kewajiban sektor usaha penanaman modal daerah;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi penyimpangan kegiatan sektor usaha penanaman modal daerah;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan penyimpangan kegiatan sektor usaha penanaman modal daerah;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan sektor usaha penanaman modal daerah;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemantauan dan pengawasan sektor usaha penanaman modal daerah;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan pemantauan dan pengawasan sektor usaha penanaman modal daerah;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan sektor usaha penanaman modal daerah;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemantauan dan pengawasan sektor usaha penanaman modal daerah; dan

- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Pembinaan Penanaman Modal.

Seksi Pembinaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kegiatan penanaman modal daerah.

Uraian tugas Seksi Pembinaan Penanaman Modal adalah sebagai berikut.

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kajian teknis dan desain serta pengembangan informasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal daerah;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kegiatan pelaksanaan penanaman modal daerah;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data kegiatan pelaksanaan penanaman modal daerah;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peningkatan kepatuhan pemenuhan kewajiban sektor usaha penanaman modal daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi eliminasi penyimpangan kegiatan sektor usaha penanaman modal daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

6. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang produksi dan industri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kehutanan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kelautan dan perikanan;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan;

- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perindustrian;
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi; dan
- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pariwisata.

Uraian tugas Bidang Perizinan Produksi dan Industri adalah sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan dan non perizinan bidang ekonomi dan sumberdaya alam;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kehutanan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang energi sumberdaya mineral;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kelautan dan perikanan ;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perindustrian;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pariwisata;

- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Perizinan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Seksi Perizinan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan dan Sumber Daya Alam meliputi kehutanan, lingkungan dan energi dan sumberdaya mineral.

Uraian tugas Seksi Perizinan Kehutanan, Pertambangan dan Energi sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumberdaya mineral;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumberdaya mineral;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumberdaya mineral;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumberdaya mineral;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi serta klarifikasi kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumberdaya mineral;
- f. menyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumberdaya mineral;
- g. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumberdaya mineral;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumberdaya mineral;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumberdaya mineral;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumberdaya mineral;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumberdaya mineral;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumberdaya mineral;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kehutanan, lingkungan, dan Energi dan sumberdaya mineral; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Perizinan Ekonomi.

Seksi Perizinan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Ekonomi meliputi kelautan dan perikanan, pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan pariwisata.

Uraian tugas Seksi Ekonomi Perizinan Pertanian, Kesehatan dan Perdagangan adalah sebagai berikut.

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;

- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Kesehatan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi serta klarifikasi kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
- f. menyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
- g. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan perizinan dan

- non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Pariwisata; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

7. Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial

Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang perizinan infrastruktur dan sosial meliputi, sektor perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perhubungan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanahan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pendidikan;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kesehatan;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang tenaga kerja;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang sosial;
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kearsipan;
- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penelitian;

Uraian tugas Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan dan non perizinan bidang infrastruktur dan sosial;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perhubungan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang energi sumberdaya mineral;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kelautan dan perikanan ;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan;

- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perindustrian;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pariwisata;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Perizinan Sosial.

Seksi Perizinan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Sosial meliputi pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian.

Uraian tugas Seksi Perizinan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Kesehatan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian Sektor Peternakan dan sektor Perkebunan, Perdagangan, Perindustrian;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi serta klarifikasi kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;
- f. menyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;
- g. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Perizinan Infrastruktur.

Seksi Perizinan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Infrastruktur meliputi sektor perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan.

Uraian tugas Seksi Perizinan Sarana Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan adalah sebagai berikut.

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi serta klarifikasi kelayakan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
- f. menyiapkan bahan dan memproses penolakan atau persetujuan permohonan perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
- g. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;

- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang Perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan pertanahan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan penanganan pengaduan, konsultasi, penyusunan kebijakan dan pengembangan layanan dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan penanganan pengaduan, konsultasi, penyusunan kebijakan dan pengembangan layanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan data dan

informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

Uraian tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penanganan pengaduan, konsultasi, penyusunan kebijakan dan pengembangan layanan dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bidang

a. Seksi Kebijakan, Hukum dan Pelayanan Pengaduan.

Seksi Kebijakan, Hukum dan Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, konsultasi, fasilitasi advokasi, penanganan pengaduan dan pengembangan layanan terpadu perizinan dan non perizinan .

Uraian tugas Seksi Kebijakan, Hukum dan Pelayanan Pengaduan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan administrasi pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- b. menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- c. merencanakan penanganan pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- d. mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- e. memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;

- f. Menganalisis dan merumuskan data permasalahan penanganan pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- g. memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- h. mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- i. membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- j. menyusun laporan penanganan pengaduan dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- k. menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
- l. merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- m. mengumpulkan dan menganalisis bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- n. mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- o. mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;

- p. pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan administrasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- r. menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah;
- s. menyiapkan data dan bahan serta menyusun pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (sop, sp, spm dan mp), dan inovasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- t. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan kebijakan, fasilitasi advokasi dan penanganan pengaduan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

b. Seksi Data dan Informasi.

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

Uraian tugas Seksi Data dan Informasi adalah sebagai berikut:

- a. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- b. melakukan verifikasi/validasi data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- c. melakukan pengolahan data dan pelaporan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- d. melakukan analisa perkembangan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;

- e. melakukan evaluasi data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- f. melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- g. melakukan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- h. membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta meningkatkan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- i. merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, inovasi pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- j. menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (sop, sp, spm dan mp), dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik);
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan ;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tema pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2019 yakni : “Memacu Investasi melalui Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang merata dan Berdaya Saing menuju Kalsel Mapan” dengan 13 Prioritas pembangunan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mendukung prioritas ke-12 yakni Kalsel menuju daerah industri, perdagangan, dan jasa.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan pembangunan pada urusan wajib penanaman modal, dengan menjalankan 2 (dua) program prioritas urusan penanaman modal yang didukung dengan program kesekretariatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan telah menerapkan hasil evaluasi pohon kinerja (*casecading*) oleh tim dan Kementerian PAN RB. Adapun *casecading* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan terlampir

Dalam pelaksanaannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan 6 (enam) program yang terdiri dari 4 (empat) program rutin / kesekretariatan dan 2 (dua) program urusan penanaman modal/nonrutin, yakni:

Rutin Kesekretariatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur
4. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan

Non Rutin/ Urusan

5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
6. Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan.

Program pembangunan tersebut dijabarkan menjadi beberapa kegiatan dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal
2. Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha
3. Penyelenggaraan Pameran Investasi
4. Identifikasi Potensi dan Evaluasi Kebijakan Investasi
5. Forum Investasi Kalimantan Selatan
6. Pengendalian Pelaksanaan Investasi dalam rangka Fasilitasi Penyelesaian masalah
7. Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Sosialisasi Perizinan
8. Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Pemberian Perizinan dan Evaluasi Perizinan
9. Evaluasi dan Sertifikasi Standar Pelayanan SMM Berbasis ISO 9001
10. Pelayanan Penanaman Modal
11. Program Kegiatan Kesekretariatan.

Adapun usulan dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 terlampir sebagai bahan usulan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

BAB V

PENUTUP

Perjanjian dan kesepakatan internasional terkait perdagangan bebas, kini gencar dilakukan, oleh pemerintah tanpa pernah mencoba melihat dampak yang akan ditimbulkan. Indonesia sendiri telah menyepakati area perdagangan bebas, diantaranya : Asean Free Trade Agreement (AFTA), Indonesia – Jepang EPA, Asean – China FTA, Asean – Korea FTA. Sedangkan yang masih dalam tahap perundingan adalah Asean – India FTA, Asean – EU FTA, Asean – Australia – New Zealand FTA. Sementara zona perdagangan bebas antara Indonesia – AS FTA dan Indonesia – EFTA (Swis, Leichestein, Norwegia dan Island) masih dalam proses Pra-negosiasi dan *joint study group*. Salah satu yang menyita banyak perhatian hari ini adalah kesepakatan zona perdagangan bebas antara persekutuan negara-negara Asean (termasuk Indonesia), dengan China upaya mengatasi dampak perdagangan bebas terhadap perkembangan investasi memerlukan upaya maksimal dari seluruh sektor terkait dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu kondisi keamanan dalam negeri serta upaya memulihkan kepercayaan para investor terhadap iklim investasi di daerah kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, antara lain diperlukan sumber daya manusia yang handal serta prasarana dan sarana yang mendukung harus lebih dahulu dibenahi dan dilengkapi.

Pelimpahan kewenangan penanaman modal ke Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah memerlukan persiapan yang matang baik menyangkut perangkat keras maupun perangkat lunaknya dan memerlukan biaya yang tidak sedikit serta memerlukan tahapan-tahapan yang terencana, baik menyangkut biaya maupun sumber daya lainnya untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Terlaksana rencana kerja ini akan sangat ditentukan partisipasi, kesungguhan dan kerja keras seluruh aparaturnya dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Tercapainya keberhasilan juga sangat ditentukan dukungan berbagai pihak, kebijaksanaan pimpinan ditingkat Provinsi serta tersedianya anggaran yang memadai.

Banjarbaru,
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan,

Ir. H. Nafarin, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620513 198903 1 011

TABEL T-C 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2019
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nama Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Sampai Dengan Tahun Lalu (2018)			Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (2019)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran SKPD 2019 (8+9+10+11)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2019			Tingkat Capain Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2021	
1	2	3	4	5			6			7			12			13 = 6 + 12			14= 13 / 5 X 100%	
				K	Unit	Rp (Ribu)	K	Unit	Rp (Ribu)	K		Rp (Ribu)	K	Unit	Rp (Ribu)	K	Unit	Rp (Ribu)	Kinerja (%)	Rp (%)
		URUSAN WAJIB YANG DI LAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN)																		
		Urusan yang dapat dilaksanakan setiap SKPD																		
1	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD	500	%	22.449.114	100	%	3.031.094	100	%	3.529.000	100,00	%	3.369.972	200,00	%	4.838.727	40,00	21,55
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	60	Bulan	157.532	12	Bulan	18.251	0	-	0	0	-	0	12	Bulan	18.251	20,00	11,59
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	3.841.913	12	Bulan	463.407	12	Bulan	583.000	12	Bulan	537.846	24	Bulan	1.001.253	40,00	26,06
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	60	Bulan	975.560	12	Bulan	194.690	12	Bulan	198.000	12	Bulan	187.111	24	Bulan	381.801	40,00	39,14
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	60	Bulan	1.037.200	12	Bulan	229.513	0	-	0	0	-	0	12	Bulan	229.513	20,00	22,13
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	60	Bulan	803.247	12	Bulan	69.901	0	-	0	0	-	0	12	Bulan	69.901	20,00	8,70
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	60	Bulan	558.720	12	Bulan	79.722	0	-	0	0	-	0	12	Bulan	79.722	20,00	14,27

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	60	Bulan	210.128	12	Bulan	35.987	100	%	43.000	12	Bulan	42.963	24	Bulan	78.950	40,00	37,57
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	60	Bulan	531.644	12	Bulan	89.306	100	%	70.000	12	Bulan	69.836	24	Bulan	159.142	40,00	29,93
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	60	Bulan	2.112.940	12	Bulan	267.605	100	%	350.000	12	Bulan	283.526	24	Bulan	551.130	40,00	26,08
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60	Bulan	1.995.878	12	Bulan	334.449	11	Bulan	380.000	12	Bulan	356.618	24	Bulan	691.067	40,00	34,62
		Rapt-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Persentase pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	60	Bulan	5.638.975	12	Bulan	778.388	0	Bulan	0	0	-	0	12	Bulan	778.388	20,00	13,80
		Rapt-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Persentase pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	60	Bulan	2.879.545	12	Bulan	237.336	0	Bulan	0	0	-	0	12	Bulan	237.336	20,00	8,24
		Penataan Perpustakaan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	60	Bulan	263.712	12	Bulan	58.777	100	%	70.000	12	Bulan	69.920	24	Bulan	128.697	40,00	48,80
		Penyediaan Jasa Teknis Perizinan	tersedianya jasa teknis perizinan	60	Bulan	1.442.120	12	Bulan	173.762	12	Bulan	260.000	12	Bulan	259.813	24	Bulan	433.575	40,00	30,07
		Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	36	Bulan	1.048.320				12	Bulan	240.000	12	Bulan	237.337	12	Bulan	237.337	33,33	22,64
		Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Penggandaan		36	Bulan	982.800				12	Bulan	225.000	12	Bulan	219.866	12	Bulan	219.866	33,33	22,37
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		36	Bulan	5.642.000				12	Bulan	1.110.000	12	Bulan	1.105.137	12	Bulan	1.105.137	33,33	19,59
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		31,76	24,45	
Predikat Kinerja																		R	SR	
2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase aset yang tercatat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD Persentase aset yang tercatat	500	%	5.689.085	100	%	625.009	100	%	1.778.000	35,15	%	1.694.435	135	%	1.953.133	27,03	34,33
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah aset yang diadakan	12	Buah	1.170.000	2	buah	69.300	2	Buah	545.000	2	buah	539.450	4	buah	608.750	33,33	52,03

		Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	60	Bulan	1.075.896	12	Bulan	148.458	100	%	550.000	12	Bulan	548.811	24	Bulan	697.268	40,00	64,81
		Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	60	Bulan	1.861.836	12	Bulan	214.161	100	%	300.000	12	Bulan	239.864	24	Bulan	454.025	40,00	24,39
		Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	60	Bulan	627.948	12	Bulan	69.788	0	-	0	0	-	0	12	Bulan	69.788	20,00	11,11
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan	1	paket	953.405	1	paket	98.640	0	-	0	0	-	0	1	paket	98.640	100,00	10,35
		Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah asset yang diadakan	1	paket	466.560	1	paket	13.860	0	-	0	0	-	0	1	paket	13.860	100,00	2,97
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah asset yang diadakan	18	Buah	466.560	3	buah	10.802	0	-	0	0	-	0	3	buah	10.802	16,67	2,32
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		54	unit	1.179.360				18	unit	270.000	18	unit	254.465	18	unit	254.465	33,33	21,58
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		36	Bulan	436.800				12	Bulan	113.000	12	Bulan	111.845	12	Bulan	111.845	33,33	25,61
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			46,30	23,91
Predikat Kinerja																			SR	SR
3	Persentase peserta pelatihan/ bimek yang paham	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peserta pelatihan/bimek yang paham	500	%	1.529.970	100	%	194.360	100	%	245.000	100,00	%	243.272	200	%	194.360	40,00	12,70
		Kursus, Pendidikan, Pelatihan / Bimek yang paham	Persentase peserta pelatihan/bimek yang paham	500	%	1.529.970	100	%	194.360	0	-	0	0	%	0	100	%	194.360	20,00	12,70
		Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peserta pelatihan/bimek yang paham	300	%	436.800				100	%	160.000	100,00	%	158.950	100	%	158.950	33,33	36,39
		Pengadaan Pakaian Kerja dan Hari-hari Tertentu	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	300	%	371.280				100	%	85.000	100,00	%	84.322	100	%	84.322	33,33	22,71
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			28,89	23,93
Predikat Kinerja																			SR	SR
4	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP Persentase aset yang tercatat Persentase penyerapan anggaran SKPD	Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMTSP Nilai komponen pelaporan pada LKIP DPMTSP	80	nilai	1.930.572	100	%	333.737	72,5	nilai	322.600	103,45	%	311.118	203,45		379.697	19,67	19,67

		Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	5	dokumen	166.852	1	Dokumen	15.600	0	-	0	0	-	0	1	Dokumen	15.600	20,00	9,35
		Penatalaksanaan perencanaan dan pelaporan program penanaman modal	Jumlah dokemnn pelaporan	36	Dokumen	1.650.720	7	Dokumen	307.597	0	-	0	0	-	0	7	Dokumen	307.597	19,44	18,63
		Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Survey dan tersusunnya dokumen IKM	10	Dokumen	113.000	2	Dokumen	10.540	2	Dokumen	46.000	2	Dokumen	45.960	4	Dokumen	56.500	40,00	50,00
		Penyusunan dan Pelaporan Keuangan dan Aset SKPD		3	Dokumen	66.240				1	Dokumen	15.600	1	Dokumen	9.700	1	Dokumen	9.700	33,33	14,64
		Penyusunan dan Pelaporan Kinerja SKPD		15	Dokumen	806.400				5	Dokumen	261.000	5	Dokumen	255.458	5	Dokumen	255.458	33,33	31,68
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			29,22	24,86
Predikat Kinerja																			SR	SR
5	Peningkatan Rencana Investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan Rencana Investasi	14,5	Trilyun	15.665.750	9,7	Trilyun	2.688.951	10,6	Trilyun	0	0	-	0	9,70	Trilyun	2.688.951	66,90	17,16
		Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha	Jumlah Kemitraan dunia usaha	12	Kemitraan	1.770.000	3	Kemitraan	280.459	0	-	0	0	-	0	3	Kemitraan	280.459	25,00	15,85
		Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pelaksanaan pameran	54	kali	9.600.000	11	Kali	1.445.651	0	-	0	0	-	0	11	kali	1.445.651	20,37	15,06
		Identifikasi Peluang dan Potensi Investasi Daerah	Jumlah Sektor Potensi Investasi yang teridentifikasi Jumlah Item Bahan Promosi Investasi	10 8	sektor item	2.210.000	2 6	sektor item	460.802	0	-	0	0	-	0	3 8	sektor item	460.802	65,00	20,85
		Evaluasi Kebijakan Umum Penanaman Modal	Dokumen evaluasi kebijakan pemetaan potensi	1	Dokumen	1.325.750	0	-	303.560	0	-	0	0	-	0	0	Dokumen	303.560	0,00	22,90
		Forum Investasi Kalimantan Selatan	Persentase rekomendasi hasil forum yang ditindaklanjuti	100	%	760.000	100	%	198.479	0	-	0	0	-	0	100	%	198.479	20,00	26,12
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			26,07	20,15
Predikat Kinerja																			SR	SR
6	Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Program Peningkatan Iklim Investasi	Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	14,4	Trilyun	5.678.521	8,1	Trilyun	973.943	9,2	Trilyun	2.971.800	10,1	Trilyun	2.856.212	18,2	Trilyun	1.411.855	126,39	24,86
		Pengawasan dan Pelaksanaan Taks Force Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Investasi	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM Persentase Pengawasan Perusahaan PM	30 50	% %	3.128.521	20 50	% %	474.297	0	-	0	0,00	-	0	100,00	%	474.297	25,11	15,16

		Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Pengelolaan sistem informasi perizinan dan penanaman modal	60	Bulan	2.550.000	12	Bulan	499.645	12	Bulan	450.800	12	Bulan	437.912	24	Bulan	937.558	18,45	36,77
		Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha	Jumlah Kemitraan dunia usaha	6	Kemitraan	2.067.520				2	Kemitraan	350.000	2	Kemitraan	320.096	2	Kemitraan	320.096	33,33	15,48
		Penyelenggaraan Pameran Investasi	jumlah pelaksanaan pameran investasi	15	Pameran	9.100.000				5	Pameran	1.048.000	5	Pameran	1.017.809	5	Pameran	1.017.809	33,33	11,18
		Identifikasi Potensi dan Evaluasi Kebijakan Investasi	Dokumen evaluasi kebijakan pemetaan potensi	3	Dokumen	2.446.080				1	Dokumen	350.000	1	Dokumen	331.539	1	Dokumen	331.539	33,33	13,55
		Forum Investasi Kalimantan Selatan	Persentase rekomendasi hasil forum yang ditindaklanjuti	300	%	2.548.000				100	%	410.000	100,00	%	404.177	100	%	404.177	33,33	15,86
		Pengendalian Pelaksanaan Investasi dalam Rangka Fasilitasi Penyelesaian Masalah	persentase pengawasan perusahaan PM	120	%	3.821.448				40	%	363.000	40,00	%	344.679	40	%	344.679	33,33	9,02
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			30,03	16,72
Predikat Kinerja																			SR	SR
7	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Nilai	7.520.023	77,5	Nilai	1.044.101	80	Nilai	1.113.843	82,61	Nilai	1.066.658	160,1		1.759.429	23,40	23,40
		Sosialisasi Perizinan se Kalsel	jumlah pelaksanaan sosialisasi	20	kali	1.400.000	100	%	159.767	0	-	0	0,00	-	0	100	%	159.767	20,00	11,41
		Rapat Koordinasi Perizinan dengan Instansi terkait dan Kab/Kota se Kalsel	persentase pemenuhan permohonan perizinan dan non perizinan	100	%	1.550.000	100	%	321.460	0	-	0	0,00	-	0	100	%	321.460	20,00	20,74

		Evaluasi Sertifikasi Standar Pelayanan SMM Berbasis ISO 9001	ISO 9001	5	Dokumen	1.223.100	1	dokumen	111.008	1	dokumen	150.000	1	dokumen	146.456	2	Dokumen	257.464	20,00	21,05
		Pelayanan Penanaman Modal	persentase workshop/ sosialisasi	15	kali	1.911.080	3	kali	255.571	3	kali	335.000	3	kali	306.818	6	kali	562.389	40,00	29,43
		Peninjauan Lapangan untuk syarat Teknis Pemberian Perizinan dan Evaluasi Perizinan	persentase pemenuhan permohonan perizinan dan non perizinan	500	%	1.435.843	100	%	196.296	100	%	268.843	100,00	%	262.055	200	%	458.350	20,00	31,92
		Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Sosialisasi Perizinan	Pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi	12	kali	1.765.400	0	-	0	4	kali	360.000	4	kali	351.330	4	kali	351.330	33,33	19,90
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			25,56	22,41
																			SR	SR
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			31,12	22,35
Predikat Kinerja																			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												9.960.243			9.540.382					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				

TABEL TC-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan						
Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja dan Keuangan	100%	370.000.000		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja dan Keuangan		100%	370.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	3 Dokumen	74.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	APBD	3 Dokumen	74.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya Rakernis	1 Dokumen	74.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya Rakernis	APBD	1 Dokumen	74.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	1 Dokumen	74.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	APBD	1 Dokumen	74.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	74.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	APBD	1 Dokumen	74.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	2 Dokumen	74.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	APBD	2 Dokumen	74.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja dan Keuangan	100%	16.700.000		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja dan Keuangan		100%	8.403.508.000
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya/Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	APBD	12 Bulan	8.386.808.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Akutansi dan Pelaporan Keuangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	1 Dokumen	4.175.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Akutansi dan Pelaporan Keuangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	APBD	1 Dokumen	4.175.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	1 Dokumen	4.175.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	APBD	1 Dokumen	4.175.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	1 Dokumen	4.175.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	APBD	1 Dokumen	4.175.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	1 Dokumen	4.175.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	APBD	1 Dokumen	4.175.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	4.795.405.200		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	4.795.405.200
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	75.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	APBD	12 bulan	75.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	684.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kalimantan Selatan	Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	APBD	12 bulan	684.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	198.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	APBD	12 bulan	198.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	345.600.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya jasa kebersihan kantor	APBD	12 bulan	345.600.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	75.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	APBD	12 bulan	75.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	75.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	APBD	12 bulan	75.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	100%	60.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	APBD	100%	60.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	100%	133.012.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	APBD	100%	133.012.000

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan bahan logistik kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	100%	511.187.600	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan bahan logistik kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	APBD	100%	511.187.600
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya makanan dan minuman	11 Bulan	421.850.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Provinsi Kalimantan Selatan	Tersedianya makanan dan minuman	APBD	11 Bulan	421.850.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase pegawai yang administrasi kepegawaian dilayani secara tertib	100%	1.100.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase pegawai yang administrasi kepegawaian dilayani secara tertib	APBD	100%	1.100.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah aset yang diadakan	-	0	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah aset yang diadakan	APBD	-	0
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah aset yang diadakan	3 Buah 2 Set	108.500.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah aset yang diadakan	APBD	3 Buah 2 Set	108.500.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah aset yang diadakan		200.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah aset yang diadakan	APBD		200.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur	100%	316.784.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur	APBD	100%	316.784.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur	100%	376.471.600	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur	APBD	100%	376.471.600
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur	100%	115.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur	APBD	100%	115.000.000
Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Administrasi Umum		Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur	100%	244.000.000		Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Administrasi Umum		Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur		100%	244.000.000
Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur	100%	50.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur	APBD	100%	50.000.000
Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur	100%	25.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur	APBD	100%	25.000.000
Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur	100%	25.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur	APBD	100%	25.000.000
Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase peserta pelatihan/bimtek yang paham	100%	48.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase peserta pelatihan/bimtek yang paham	APBD	100%	48.000.000
Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase peserta pelatihan/bimtek yang paham	100%	48.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase peserta pelatihan/bimtek yang paham	APBD	100%	48.000.000
Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase peserta pelatihan/bimtek yang paham	100%	48.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase peserta pelatihan/bimtek yang paham	APBD	100%	48.000.000
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Realisasi Investasi PMA dan PMDN	14,4T Rupiah	585.310.000		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Realisasi Investasi PMA dan PMDN		14,4T Rupiah	585.310.000
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	Kebijakan Investasi	1 Dokumen	474.835.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	Kebijakan Investasi	APBD	1 Dokumen	474.835.000
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan			110.475.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan		APBD		110.475.000

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Promosi		Realisasi Investasi PMA dan PMDN	14,4T Rupiah	500.000.000		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Promosi		Realisasi Investasi PMA dan PMDN		14,4T Rupiah	500.000.000
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan	- Dokumen Evaluasi Kebijakan - Identifikasi Potensi	1 Dokumen 1 Dokumen	250.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan	- Dokumen Evaluasi Kebijakan - Identifikasi Potensi		1 Dokumen 1 Dokumen	250.000.000
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan	- Identifikasi Potensi	1 Dokumen	250.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan	- Identifikasi Potensi		1 Dokumen	250.000.000
Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Realisasi Investasi PMA dan PMDN	14,4 Trilyun Rupiah	3.078.686.000		Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Realisasi Investasi PMA dan PMDN		14,4 Trilyun Rupiah	3.078.686.000
Program Promosi Penanaman Modal	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan	Persantase Rekomendasi Hasil forum yang ditindaklanjuti	100%	768.848.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Promosi Penanaman Modal	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan	Persantase Rekomendasi Hasil forum yang ditindaklanjuti	APBD	100%	768.848.000
Program Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Promosi	Provinsi Kalimantan Selatan	-Jumlah pelaksanaan Pameran - Jumlah Potensi Daerah yang di promosikan	10 Kali 10 Pameran	2.309.838.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Promosi	Provinsi Kalimantan Selatan	-Jumlah pelaksanaan Pameran - Jumlah Potensi Daerah yang di promosikan	APBD	10 Kali 10 Pameran	2.309.838.000
Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B (85)	2.367.941.000		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		B (85)	2.367.941.000
Program Pelayanan Penanaman Modal	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Selatan	- Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan - Tersedianya Jasa Teknis Perizinan - Survey dan tersusunnya Dokumen IKM - Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan Sistem Perizinan Online Penanaman Modal (OSS)	-100% - 12 Bulan - 2 Dokumen -60%	756.734.250	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Selatan	- Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan - Tersedianya Jasa Teknis Perizinan - Survey dan tersusunnya Dokumen IKM - Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan Sistem Perizinan Online Penanaman Modal (OSS)	APBD	-100% - 12 Bulan - 2 Dokumen -60%	756.734.250
Program Pelayanan Penanaman Modal	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	- Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan - Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan Sistem Perizinan Online Penanaman Modal (OSS)	-100% -60%	796.446.250	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	- Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan - Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan Sistem Perizinan Online Penanaman Modal (OSS)	APBD	-100% -60%	796.446.250
Program Pelayanan Penanaman Modal	Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Provinsi Kalimantan Selatan	- Survey dan tersusunnya Dokumen IKM - Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan Sistem Perizinan Online Penanaman Modal (OSS) - ISO 9001	- 2 Dokumen -60% 1 Dokumen	421.006.250	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Provinsi Kalimantan Selatan	- Survey dan tersusunnya Dokumen IKM - Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan Sistem Perizinan Online Penanaman Modal (OSS) - ISO 9001	APBD	- 2 Dokumen -60% 1 Dokumen	421.006.250
Program Pelayanan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	- Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan - Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan Sistem Perizinan Online Penanaman Modal (OSS)	100% 60%	393.754.250	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	- Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan - Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan Sistem Perizinan Online Penanaman Modal (OSS)	APBD	100% 60%	393.754.250

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Realisasi Investasi PMA dan PMDN	14,4 Trilyun Rupiah	612.400.000		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Realisasi Investasi PMA dan PMDN		14,4 Trilyun Rupiah	612.400.000
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Pengawasan Perusahaan Penanaman Modal	50%	200.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Pengawasan Perusahaan Penanaman Modal	APBD	50%	200.000.000
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah perusahaan yang Melaksanakan kegiatannya	400 Perusahaan	200.000.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah perusahaan yang Melaksanakan kegiatannya	APBD	400 Perusahaan	200.000.000
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Pengawasan Perusahaan Penanaman Modal	50%	212.400.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Pengawasan Perusahaan Penanaman Modal	APBD	50%	212.400.000
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		Realisasi Investasi PMA dan PMDN	14,4 Trilyun Rupiah	531.228.000		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		Realisasi Investasi PMA dan PMDN		14,4 Trilyun Rupiah	531.228.000
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Selatan	Inventarisasi dan Updating data investasi, perizinan dan non perizinan Kab/Kota yang telah menggunakan SPIPISE/OSS terkait LKPM	100%	531.228.000	Provinsi Kalimantan Selatan	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Selatan	Inventarisasi dan Updating data investasi, perizinan dan non perizinan Kab/Kota yang telah menggunakan SPIPISE/OSS terkait LKPM	APBD	100%	531.228.000
			Cetak LKPM	1 Dokumen						Cetak LKPM		1 Dokumen	
			Cetak Realisasi Investasi	4 Dokumen						Cetak Realisasi Investasi		4 Dokumen	
			Bimbingan Teknis LKPM Online dan SI CANTIK Cloud	2 laporan						Bimbingan Teknis LKPM Online dan SI CANTIK Cloud		2 laporan	
			Updating dan Maintenance Aplikasi SIMAPAN	1 Dokumen						Updating dan Maintenance Aplikasi SIMAPAN		1 Dokumen	
					13.101.670.200								21.488.478.200

TABEL TC-32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAH TERPADU SATU PINTU

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Realisasi Investasi PMA dan PMDN	14,4T Rupiah	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	Kebijakan Investasi	1 Dokumen	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan			
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Promosi		Realisasi Investasi PMA dan PMDN	14,4T Rupiah	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan	- Dokumen Evaluasi Kebijakan - Identifikasi Potensi	1 Dokumen 1 Dokumen	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan	- Identifikasi Potensi	1 Dokumen	
Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Realisasi Investasi PMA dan PMDN	14,4 Trilyun Rupiah	
Program Promosi Penanaman Modal	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Rekomendasi Hasil forum yang ditindaklanjuti	100%	
Program Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Promosi	Provinsi Kalimantan Selatan	-Jumlah pelaksanaan Pameran - Jumlah Potensi Daerah yang di promosikan	10 Kali 10 Pameran	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B (85)	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Selatan	- Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan - Tersedianya Jasa Teknis Perizinan - Survey dan tersusunnya Dokumen IKM - Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan Sistem Perizinan Online Penanaman Modal (OSS)	-100% - 12 Bulan - 2 Dokumen -60%	

Program Pelayanan Penanaman Modal	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	- Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan - Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan Sistem Perizinan Online Penanaman Modal (OSS)	-100% -60%	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Provinsi Kalimantan Selatan	- Survey dan tersusunnya Dokumen IKM - Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan Sistem Perizinan Online Penanaman Modal (OSS) - ISO 9001	- 2 Dokumen -60% 1 Dokumen	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	- Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan - Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan Sistem Perizinan Online Penanaman Modal (OSS)	100% 60%	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Realisasi Investasi PMA dan PMDN	14,4 Trilyun Rupiah	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Pengawasan Perusahaan Penanaman Modal	50%	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah perusahaan yang Melaksanakan kegiatannya	400 Perusahaan	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Pengawasan Perusahaan Penanaman Modal	50%	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		Realisasi Investasi PMA dan PMDN	14,4 Trilyun Rupiah	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi Kalimantan Selatan	Inventarisasi dan Updating data investasi, perizinan dan non perizinan Kab/Kota yang telah menggunakan SPIPISE/OSS terkait LKPM	100%	
			Cetak LKPM	1 Dokumen	
			Cetak Realisasi Investasi	4 Dokumen	
			Bimbingan Teknis LKPM Online dan SI CANTIK Cloud	2 laporan	
			Updating dan Maintenance Aplikasi SIMAPAN	1 Dokumen	

TABEL TC-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan

SKPD	Kode	Urusan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,101	Non Urusan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja dan Keuangan		100%	370.000.000			100%	444.000.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,101,1	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Selatan	3 Dokumen	74.000.000	APBD		3 Dokumen	88.800.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,101,2	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Rakernis	Provinsi Kalimantan Selatan	1 Dokumen	74.000.000	APBD		1 Dokumen	88.800.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,101,3	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Selatan	1 Dokumen	74.000.000	APBD		1 Dokumen	88.800.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,101,4	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kalimantan Selatan	1 Dokumen	74.000.000	APBD		1 Dokumen	88.800.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,101,5	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Selatan	2 Dokumen	74.000.000	APBD		2 Dokumen	88.800.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,101	Non Urusan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja dan Keuangan		100%	8.403.508.000			100%	10.084.209.600
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,02,1	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya / Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kalimantan Selatan	12 Bulan	8.386.808.000	APBD		1 Dokumen	10.064.169.600
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,02,4	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Akutansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Selatan	1 Dokumen	4.175.000	APBD		1 Dokumen	5.010.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,02,7	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Selatan	1 Dokumen	4.175.000	APBD		1 Dokumen	5.010.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,02,8	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Selatan	1 Dokumen	4.175.000	APBD		1 Dokumen	5.010.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,02,9	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Selatan	1 Dokumen	4.175.000	APBD		1 Dokumen	5.010.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,103	Non Urusan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	4.795.405.200			100%	6.454.486.240
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,103,1	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kalimantan Selatan	12 bulan	75.000.000	APBD		12 bulan	90.000.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,103,2	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Provinsi Kalimantan Selatan	12 bulan	684.000.000	APBD		12 bulan	820.800.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,103,7	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Provinsi Kalimantan Selatan	12 bulan	198.000.000	APBD		12 bulan	237.600.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,103,8	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	12 bulan	345.600.000	APBD		12 bulan	414.720.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,103,10	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Provinsi Kalimantan Selatan	12 bulan	75.000.000	APBD		12 bulan	90.000.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,103,11	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi Kalimantan Selatan	12 bulan	75.000.000	APBD		12 bulan	90.000.000

Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,103,12	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	Provinsi Kalimantan selatan	100%	60.000.000	APBD		100%	72.000.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,103,15	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	Provinsi Kalimantan Selatan	100%	133.012.000	APBD		100%	159.614.400
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,103,16	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase Penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	Provinsi Kalimantan Selatan	100%	511.187.600	APBD		100%	613.425.120
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,103,17	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Provinsi Kalimantan Selatan	11 Bulan	421.850.000	APBD		11 Bulan	506.220.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,103,18	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase pegawai yang administrasi kepegawaian dilayani secara tertib	Provinsi Kalimantan Selatan	100%	1.100.000.000	APBD		100%	1.320.000.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,103,21	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah aset yang diadakan	Provinsi Kalimantan Selatan	-	0	APBD		-	700.000.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,103,23	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah aset yang diadakan	Provinsi Kalimantan Selatan	3 Buah 2 Set	108.500.000	APBD		3 Buah 2 Set	130.200.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,103,25	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah aset yang diadakan	Provinsi Kalimantan Selatan	12 Unit 1 Set	200.000.000	APBD		12 Unit 1 Set	240.000.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,103,29	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Geduliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur	Provinsi Kalimantan Selatan	100%	316.784.000	APBD		100%	380.140.800
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,103,31	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Geduliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur	Provinsi Kalimantan Selatan	100%	376.471.600	APBD		100%	451.765.920
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,103,35	Rutin	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Geduliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur	Provinsi Kalimantan Selatan	100%	115.000.000	APBD		100%	138.000.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,104	Rutin	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Administrasi Umum	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur		100%	244.000.000			100%	292.800.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,104,2	Rutin	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur	Provinsi Kalimantan Selatan	100%	50.000.000	APBD		100%	60.000.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,104,3	Rutin	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur	Provinsi Kalimantan Selatan	100%	25.000.000	APBD		100%	30.000.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,104,5	Rutin	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur	Provinsi Kalimantan Selatan	100%	25.000.000	APBD		100%	30.000.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,104,10	Rutin	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta pelatihan/bimtek yang paham	Provinsi Kalimantan Selatan	100%	48.000.000	APBD		100%	57.600.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,104,11	Rutin	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta pelatihan/bimtek yang paham	Provinsi Kalimantan Selatan	100%	48.000.000	APBD		100%	57.600.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0.00.1,104,9	Rutin	Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase peserta pelatihan/bimtek yang paham	Provinsi Kalimantan Selatan	100%	48.000.000	APBD		100%	57.600.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.18.2.	Urusan Pemerintahan Wajib	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN		14,4T Rupiah	585.310.000			14.4T Rupiah	702.372.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.18.2,101,1	Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Kebijakan Investasi	Provinsi Kalimantan Selatan	1 Dokumen	474.835.000	APBD		1 Dokumen	569.802.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.18.2,101,2	Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Provinsi Kalimantan Selatan		110.475.000	APBD			132.570.000

Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.18.2.	Urusan Pemerintahan Wajib	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Promosi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN		14,4T Rupiah	500.000.000			14.4T Rupiah	600.000.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.18.2.102,1	Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	- Dokumen Evaluasi Kebijakan - Identifikasi Potensi	Provinsi Kalimantan Selatan	1 Dokumen 1 Dokumen	250.000.000	APBD		1 Dokumen 1 Dokumen	300.000.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.18.2.102,2	Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	- Identifikasi Potensi	Provinsi Kalimantan Selatan	1 Dokumen	250.000.000	APBD		1 Dokumen	300.000.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.18.3.	Urusan Pemerintahan Wajib	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN		14,4 Trilyun Rupiah	3.078.686.000			B (85) Indeks	3.694.423.200
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2,18,3,101,1	Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Persantase Rekomendasi Hasil forum yang ditindaklanjuti	Provinsi Kalimantan Selatan	100%	768.848.000	APBD		100%	922.617.600
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2,18,3,101,2	Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Promosi	-Jumlah pelaksanaan Pameran - Jumlah Potensi Daerah yang di promosikan	Provinsi Kalimantan Selatan	10 Kali 10 Pameran	2.309.838.000	APBD		10 Kali 10 Pameran	2.771.805.600
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.18,4.	Urusan Pemerintahan Wajib	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		B (85)	2.367.941.000			B (85) Indeks	2.841.529.200
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2,18,4,102,1	Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Persantase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan - Tersedianya Jasa Teknis Perizinan - Survey dan tersusunnya Dokumen IKM - Persantase Kab/Kota yang mengimplementasikan Sistem Perizinan Online Penanaman Modal (OSS)	Provinsi Kalimantan Selatan	-100% - 12 Bulan - 2 Dokumen -60%	756.734.250	APBD		-100% - 12 Bulan - 2 Dokumen -60%	908.081.100
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2,18,4,102,2	Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	- Persantase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan - Persantase Kab/Kota yang mengimplementasikan Sistem Perizinan Online Penanaman Modal (OSS)	Provinsi Kalimantan Selatan	-100% -60%	796.446.250	APBD		-100% -60%	955.735.500
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2,18,4,102,3	Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	- Survey dan tersusunnya Dokumen IKM - Persantase Kab/Kota yang mengimplementasikan Sistem Perizinan Online Penanaman Modal (OSS) - ISO 9001	Provinsi Kalimantan Selatan	- 2 Dokumen -60% 1 Dokumen	421.006.250	APBD		- 2 Dokumen -60% 1 Dokumen	505.207.500
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2,18,4,102,4	Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	- Persantase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan - Persantase Kab/Kota yang mengimplementasikan Sistem Perizinan Online Penanaman Modal (OSS)	Provinsi Kalimantan Selatan	100% 60%	393.754.250	APBD		100% 60%	472.505.100
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.18,5.	Urusan Pemerintahan Wajib	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN		14,4 Trilyun Rupiah	612.400.000			B (85) Indeks	734.880.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2,18,5,101,1	Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persantase Pengawasan Perusahaan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	50%	200.000.000	APBD		50%	240.000.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2,18,5,101,2	Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang Melaksanakan kegiatannya	Provinsi Kalimantan Selatan	400 Perusahaan	200.000.000	APBD		400 Perusahaan	240.000.000
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2,18,5,101,3	Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persantase Pengawasan Perusahaan Penanaman Modal	Provinsi Kalimantan Selatan	50%	212.400.000	APBD		50%	254.880.000

Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.18.6.	Urusan Pemerintahan Wajib	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN		14,4 Trilyun Rupiah	531.228.000			B (85) Indeks	637.473.600
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2,18,6,101,1	Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Inventarisasi dan Updating data investasi, perizinan dan non perizinan Kab/Kota yang telah menggunakan SPIPISE/OSS terkait LKPM	Provinsi Kalimantan Selatan	100%	531.228.000	APBD		100%	637.473.600
					Cetak LKPM		1 Dokumen				1 Dokumen	
					Cetak Realisasi Investasi		4 Dokumen				4 Dokumen	
					Bimbingan Teknis LKPM Online dan SI CANTIK Cloud		2 laporan				2 laporan	
					Updating dan Maintenance Aplikasi SIMAPAN		1 Dokumen				1 Dokumen	
TOTAL PAGU ANGGARAN								21.488.478.200				26.486.173.840

IV.2 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TABEL IV.2

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7,675,565,000	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			7,675,565,000	
2.18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	14,4T Rupiah	1,085,310,000	
2.18.02.1.01	<u>PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI</u>	Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	14,4T Rupiah	585,310,000	
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen Evaluasi kebijakan	1 Dokumen	474,835,000	110.475.000+354.360.000
2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen Evaluasi kebijakan	1 Dokumen	110,475,000	
2.18.02.1.02	<u>PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI</u>	Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	12T Rupiah	500,000,000	
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Identifikasi Potensi	1 Dokumen	250,000,000	
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Identifikasi Potensi	1 Dokumen	250,000,000	

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN
2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	14,4T Rupiah	3,078,686,000	
2.18.03.1.01	<u>PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI</u>	Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	14,4T Rupiah	3,078,686,000	
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Persentase Rekomendasi hasil forum yang ditindaklanjuti	100 %	768,848,000	
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	- Jumlah pelaksanaan pameran - Jumlah Potensi Investasi daerah yang dipromosikan	10 kali 10 Potensi	2,309,838,000	
2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (85) Indeks	2,367,941,000	
2.18.04.1.02	<u>PENANAMAN MODAL YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI</u>	Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (85) Indeks	2,367,941,000	
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	- Persentase pemenuhan permohonan perizinan dan non perizinan - Tersedianya jasa teknis perizinan - Survey dan tersusunnya dokumen IKM - Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan Sistem Perizinan online Penanaman Modal (OSS)	100 % 12 Bulan 2 Dokumen 60 %	756,734,250	

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	- Persentase pemenuhan permohonan perizinan dan non perizinan - Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan Sistem Perizinan online Penanaman Modal (OSS)	100 % 60 %	796,446,250	
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	- Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan Sistem Perizinan online Penanaman Modal (OSS) - Survey dan tersusunnya dokumen IKM - ISO 9001	60 % 2 Dokumen 1 Dokumen	421,006,250	
2.18.04.1.02.04	SKoordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	- Persentase pemenuhan permohonan perizinan dan non perizinan - Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan Sistem Perizinan online Penanaman Modal (OSS)	100 % 60 %	393,754,250	
2.18.5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	• Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	• 14,4T Rupiah	612,400,000	
2.18.05.1.01	<u>PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI</u>	Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	14,4T Rupiah	612,400,000	
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	. Persentase Pengawasan Perusahaan Penanaman Modal	50 %	200,000,000	
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	. Persentase Pengawasan Perusahaan Penanaman Modal	50 %	200,000,000	

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	. Persentase Pengawasan Perusahaan Penanaman Modal	50 %	212,400,000	
2.18.6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	14,4T Rupiah	531,228,000	
2.18.06.1.01	<u>URUSAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH PROVINSI</u>	Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	14,4T Rupiah	531,228,000	
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	- Inventarisasi dan Updating data investasi, perizinan dan non perizinan Kab/Kota yang telah menggunakan SPIPISE/OSS terkait LKPM - Cetak LKPM - Cetak Realisasi Investasi - Bimbingan Teknis LKPM Online dan SI CANTIK Cloud - Updating dan Maintenance investasi PMA dan PMDN	100 % 1 Dokumen 4 Dokumen 2 laporan 1 Dokumen	531,228,000	
X	Non Urusan			13,812,913,200	
X.XX	NON BIDANG URUSAN			13,812,913,200	
X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja dan Keuangan	100 % 100 %	13,812,913,200	

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN
X.XX.01.1.01	<u>PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</u>	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja dan Keuangan	100 %	370,000,000	
X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	-Nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMPTSP - Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP - Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	- A Nilai - A Nilai 5 Dokumen	74,000,000	
X.XX.01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	-Nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMPTSP - Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP - Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	- A Nilai - A Nilai 5 Dokumen	74,000,000	
X.XX.01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	-Nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMPTSP - Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP - Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	- A Nilai - A Nilai 5 Dokumen	74,000,000	
X.XX.01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	-Nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMPTSP - Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun - Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP	- A Nilai 1 Dokumen - A Nilai	74,000,000	
X.XX.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMPTSP - Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP - Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	- A Nilai - A Nilai 5 Dokumen	74,000,000	

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN
X.XX.01.1.02	<u>ADMINISTRASI KEUANGAN</u>			8,403,508,000	
X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya/terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	8,386,808,000	
X.XX.01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	4,175,000	
X.XX.01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	4,175,000	
X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	4,175,000	
X.XX.01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	4,175,000	
X.XX.01.1.03	<u>ADMINISTRASI UMUM</u>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	4,795,405,200	
X.XX.01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	100 %	75,000,000	
X.XX.01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	100 %	75,000,000	
X.XX.01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	100 %	75,000,000	
X.XX.01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	100 %	60,000,000	
X.XX.01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Persentase Penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana - Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	100 % 100 %	133,012,000	

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN
X.XX.01.1.03.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	100 %	511,187,600	
X.XX.01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	11 Bulan	421,850,000	
X.XX.01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase pegawai yang administrasi kepegawaian dilayani secara tertib	100 %	1,100,000,000	
X.XX.01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	684,000,000	
X.XX.01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah aset yang diadakan	28 Buah	108,500,000	
X.XX.01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah aset yang diadakan	1 set	200,000,000	
X.XX.01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur	100 %	316,784,000	
X.XX.01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur	100 %	376,471,600	
X.XX.01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana aparatur	100 %	115,000,000	
X.XX.01.1.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan	198,000,000	
X.XX.01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	345,600,000	

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN
X.XX.01.1.04	<u>PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</u>	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur	100 %	244,000,000	
X.XX.01.1.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta pelatihan/bimtek yang paham	100 %	48,000,000	
X.XX.01.1.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta pelatihan/bimtek yang paham	100 %	48,000,000	
X.XX.01.1.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	100 %	50,000,000	
X.XX.01.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Persentase penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	100 %	25,000,000	
X.XX.01.1.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Persentase Penyediaan dokumen terkait sarana dan prasarana	100 %	25,000,000	
X.XX.01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase peserta pelatihan/bimtek yang paham	100 %	48,000,000	
		Total Pagu:		21,488,478,200	